

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan salah satu pejabat pemerintahan ialah bupati. Tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain itu harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam keadaan tertentu, pejabat pemerintahan dapat mengeluarkan suatu keputusan atau tindakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebut diskresi (*freies ermessen*). Kenyataannya, terdapat pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan di luar diskresi (*freies ermessen*) seperti halnya yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, H. Abubakar, beliau memerintahkan bawahannya mengumpulkan dana kampanye untuk tujuan pencalonan isterinya dalam Pilkada Bandung Barat.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Bupati Bandung Barat mengumpulkan dana kampanye dalam bentuk perintah kepada Weti Lembanawati selaku Kepala Disperindag Kabupaten Bandung Barat dan Adiyoto selaku Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan untuk menganalisis bagaimana kedudukan peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat dalam bentuk perintah kepada Weti Lembanawati selaku Kepala Disperindag Kabupaten Bandung Barat dan Adiyoto selaku Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian dengan menganalisis praktik pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat periode 2013-2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah kewenangan Bupati Bandung Barat mengumpulkan dana kampanye, dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*abuse de droit*) karena praktik pengumpulan dana yang dilakukan H. Abubakar tersebut tidak memiliki dasar kewenangan. Dan kedudukan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Kampanye, Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*), Tindakan Sewenang-wenang.

ABSTRACT

Law Number 30 of 2014 on Government Administration mentioned one of the government officials was the regent. The actions of government officials should essentially be based on legislation, otherwise it should be based on good general governance principles. Under certain circumstances, government officials may issue a decision or action outside the provisions of legislation called discretion (Freies Ermessen). In reality, there are government officials who perform actions outside the provisions of the legislation and based on discretion (Freies Ermessen) as did by the West Bandung Regent period 2013-2018, H. Abubakar, H. Abubakar, he ordered his subordinates to raise campaign funds for the purpose of the nomination of his wife in West Bandung elections.

The purpose of this research to analyze the extent of the authority of West Bandung Regent raised campaign funds in the form of orders to Weti Lembanawati as the head of Disperindag West Bandung Regency and Adiyoto as head Bappelitbangda West Bandung District is linked with Law Number 17 of 2003 on state finance and to analyse how policy rule position (Beleidsregel) related to fundraising campaign by Regent Bandung Barat in the form of orders to Weti Lembanawati as the head of Disperindag West Bandung Regency and Adiyoto as head of Bappelitbangda West Bandung Regency connected with Law Number 30 of 2014 on Government Administration Jo Law Number 17 of 2003 on State Finances.

This method of study uses a normative juridical approach, the specification of research by analyzing the campaign fund raising practices by the West Bandung Regent period 2013-2018. The data collection techniques used are literature studies.

The result of this research is the authority of West Bandung regent to collect campaign funds, categorized as an arbitrary act (abuse de droit) because the fund-raising practice that H. Abubakar does not have a basic authority. And the position of policy Regulation (Beleidsregel) related to fundraising campaign by the West Bandung Regent period 2013-2018, it is contrary to statutory regulations.

Keyword: *Regional Financial Management, Campaign Fund, Policy Regulation (beleidsregel), Arbitrary Actions.*